



ANALISIS PDRB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN PROVINSI DKI JAKARTA

Indrayansyah Nur

Politeknik Keuangan Negara STAN

Mukhammad Taufiqur Rakhman

Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI

Alamat Korespondensi: indrayansyah.nur@pknstan.ac.id dan mtr31786@yahoo.com

ABSTRACT

National economic growth that has an influence on the regional economic structure for national growth has an impact on regional growth. Indonesia is a unitary state, which has the characteristics that the implementation of development through planning which includes national and regional plans. The center of government and the center of Indonesian economy are in the Capital City (DKI) Jakarta. This study aims at determining the growth of DKI Jakarta's GDP due to such elements as national employment growth rates, industry mix, competitive advantage, and total GDP growth according to economic sectors and at knowing the basic sectors in DKI Jakarta which have a higher GRDP than the national average. The data analysis method employs Shift Share and Location Quotient. In the 2011-2018 Shift-Share analysis and the 2014-2018 Location Quotient (LQ) analysis, I obtained the economic sectors that resulted in the highest DKI Jakarta GRDP and base sectors. Furthermore, the mapping of economic sectors which yield the largest GRDP growth in each element and that can be used as an economic base in the sectors of Large and Retail Trade, Car and Motorcycle Repair, Information and Communication, Financial Services and Insurance, Corporate Services, Processing Industry, Construction, Transportation and Warehousing, and Real Estate sector. The economic sectors that yield the highest DKI Jakarta GRDP and base sectors are generally found in the tertiary sector and some are in the secondary sectors. However, the sector of Large Trade and Retail, Car and Motorcycle Repair, which are types of a secondary sector, in fact, generate the highest value of GRDP growth in the Shift Share analysis followed by the Construction sector, which is also a secondary sector

KATA KUNCI:

Sektor Ekonomi, PDRB, *Shift Share*, *Location Quotient*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai pengaruh atas struktur ekonomi daerah karena pertumbuhan nasional mempunyai pengaruh atas pertumbuhan daerah, sebab daerah merupakan bagian internal dari suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan, yang memiliki karakteristik bahwa pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan yang meliputi rencana nasional maupun rencana regional. Pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia berada di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan PDRB DKI Jakarta akibat unsur laju pertumbuhan kesempatan kerja nasional, bauran industri, keunggulan kompetitif dan pertumbuhan total PDRB yang dimiliki menurut sektor-sektor ekonomi dan mengetahui sektor-sektor basis di DKI Jakarta yaitu sektor yang memiliki PDRB lebih tinggi dari rata-rata nasional. Metode analisis data menggunakan *Shift Share* dan *Location Quotient*. Pada analisis *Shift-Share* tahun 2011-2018 dan *Location Quotient* (LQ) tahun 2014-2018, diperoleh sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai PDRB DKI Jakarta tertinggi dan sektor basis. Selanjutnya, pemetaan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan realisasi pertumbuhan PDRB terbesar pada masing-masing unsur dan dapat dijadikan sebagai basis ekonomi diantaranya pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor real estate. Sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai PDRB DKI Jakarta tertinggi dan sektor basis umumnya terdapat pada sektor tersier dan sebagian sektor sekunder. Akan tetapi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan sektor sekunder justru menghasilkan nilai pertumbuhan PDRB tertinggi pada analisis *Shift Share* diikuti oleh sektor Konstruksi yang juga merupakan sektor sekunder “

KLASIFIKASI JEL:

E21, E23, R110

CARA MENGUTIP:

Nur, I. & Rakhman, M.T. (2019). Analisis pdrb sektor ekonomi unggulan provinsi dki jakarta. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4),351-370.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena pertambahan penduduk berlangsung terus-menerus maka kebutuhan ekonomi juga akan semakin bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa dicapai melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto (PDB) setiap tahun. Jadi, dalam pengertian makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001).

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro, 2004). Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu melihat kepada paradigma *endowment development strategy* yaitu bahwa salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah jika pembangunan tersebut dilaksanakan sejalan/seirama dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Artinya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berbasiskan pada apa yang dimiliki sendiri sehingga bagian terbesar dari hasil-hasil pembangunan juga kembali ke daerahnya sendiri. Menurut Evi Yulian Purwanti (2008), bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini

mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga mempunyai pengaruh atas struktur ekonomi daerah karena pertumbuhan nasional mempunyai pengaruh atas pertumbuhan daerah sebab daerah merupakan bagian internal dari suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun rencana regional. Pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia berada di DKI Jakarta. Hal ini yang menjadikan DKI Jakarta merupakan provinsi yang istimewa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta merupakan tempat kedudukan hampir seluruh perangkat pemerintahan tingkat nasional, serta perwakilan negara-negara asing. Sebagai pusat perekonomian, hampir sebagian besar sektor ekonomi beroperasi di DKI Jakarta sehingga menjadikan potensi ekonomi DKI Jakarta termasuk paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini sebagaimana terlihat dari besarnya kontribusi PDRB-nya terhadap PDB Indonesia, yang menunjukkan sektor sekunder dan tersier memberikan prosentase terbesar dari pembentukan PDB nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), pada tahun 2018, secara umum DKI Jakarta termasuk provinsi penyumbang PDB terbesar, yakni sebanyak 17,34 persen dari PDB Nasional atau sebesar Rp. 1.736.195.620.000.000 dari Rp. 10.003.113.700.000.000 PDB Nasional. Hanya sektor primer yang memberikan kontribusi kecil terhadap PDB nasional tetapi untuk beberapa sektor sekunder dan sektor tersier justru memberikan kontribusi lebih dari 20-70 persen PDB nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa terutama untuk sektor primer bukan merupakan *core basis* dari aktivitas perekonomian yang ada di DKI Jakarta (lihat Tabel 1).

Tabel 1. PDRB DKI Jakarta dan PDB Nasional ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Lapangan Usaha	PDRB DKI Jakarta (Rp.)	PDB Nasional (Rp.)	% PDRB DKI terhadap PDB Nasional
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.394.390.000.000	1.307.025.700.000.000	0,11
2 Pertambangan, dan Penggalian	2.939.850.000.000	796.505.000.000.000	0,37
3 Industri Pengolahan	219.744.510.000.000	2.193.266.400.000.000	10,02
4 Pengadaan Listrik dan Gas	5.228.250.000.000	107.108.600.000.000	4,88
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	750.740.000.000	8.421.800.000.000	8,91
6 Konstruksi	215.890.440.000.000	1.048.082.800.000.000	20,60
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	276.058.360.000.000	1.376.937.400.000.000	20,05
8 Transportasi dan Pergudangan	61.318.540.000.000	435.185.300.000.000	14,09
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.779.670.000.000	314.955.200.000.000	27,24
10 Informasi dan Komunikasi	189.064.020.000.000	538.874.600.000.000	35,08
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	183.582.610.000.000	415.579.100.000.000	44,18
12 Real Estate	111.601.210.000.000	300.106.700.000.000	37,19
13 Jasa Perusahaan	139.487.440.000.000	187.691.100.000.000	74,32
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	67.893.780.000.000	349.506.600.000.000	19,43
15 Jasa Pendidikan	80.506.810.000.000	321.083.600.000.000	25,07
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.668.930.000.000	117.314.900.000.000	24,44
17 Jasa Lainnya	66.286.070.000.000	185.468.900.000.000	35,74
Jumlah	1.736.195.620.000.000	10.003.113.700.000.000	17,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah.

Rata-rata distribusi PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku tahun 2011-2018 mencapai 16,59 persen per tahun-nya terhadap PDB Nasional. Prosentase PDRB ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang semula 15,64 persen pada tahun 2011 menjadi 17,21 persen pada tahun 2017 dan terus meningkat menjadi 17,34 persen pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan distribusi PDRB setiap provinsi Indonesia, nilai ini dominan mengingat hanya 1 (satu) provinsi yang PDRB-nya mencapai lebih dari 15 persen terhadap PDB Nasional. Disamping itu, secara akumulatif untuk pulau Jawa yang menjadi lokasi keberadaan provinsi DKI Jakarta juga memberikan kontribusi utama pada PDB Nasional hingga 57 persen secara rata-rata dari tahun 2011-2018 (lihat Tabel 2).

Bandingkan dengan pulau Sumatera yang hanya sebesar 22,47 persen terdiri atas 10 (sepuluh) provinsi dan Riau adalah provinsi dengan tingkat distribusi PDRB tertinggi hanya 5,81 persen dari PDB Nasional. Apalagi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya (yang terdiri dari beberapa provinsi untuk setiap pulau) hanya berkontribusi kurang dari 10 persen dari PDB Nasional. Dengan kontribusi yang sebesar ini dapat dikatakan perkembangan perekonomian pulau Jawa, khususnya provinsi DKI Jakarta merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi secara nasional (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pulau dan Sebagian Provinsi (Persen)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Pulau Sumatera	22,87	23,11	23,08	23,17	22,17	22,03	21,74	21,58	22,47
Sumatera Utara	4,82	4,81	4,89	4,90	4,91	4,96	4,98	4,95	4,90
Riau	6,21	6,44	6,32	6,35	5,60	5,40	5,13	5,04	5,81
Sumatera Selatan	2,90	2,92	2,93	2,88	2,85	2,80	2,79	2,80	2,86
Pulau Jawa	56,69	56,69	57,07	57,37	58,34	58,49	58,37	58,48	57,69
DKI Jakarta	15,64	15,79	16,09	16,46	17,07	17,11	17,21	17,34	16,59
Jawa Barat	13,06	13,01	13,10	12,95	13,09	13,10	13,01	13,09	13,05
Jawa Tengah	8,85	8,70	8,67	8,65	8,68	8,61	8,53	8,47	8,65
DI Yogyakarta	0,91	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88
Jawa Timur	14,32	14,40	14,38	14,40	14,52	14,70	14,65	14,61	14,50
Banten	3,91	3,90	3,95	4,04	4,11	4,10	4,10	4,10	4,03
Pulau Bali dan Nusa Tenggara	2,83	2,79	2,81	2,87	3,07	3,12	3,11	3,05	2,96
Bali	1,34	1,36	1,40	1,46	1,51	1,54	1,55	1,56	1,47
Pulau Kalimantan	9,92	9,66	9,24	8,71	8,16	7,88	8,24	8,2	8,75
Kalimantan Timur	6,58	6,35	5,40	4,86	4,33	4,03	4,31	4,26	5,02
Pulau Sulawesi	5,23	5,41	5,49	5,63	5,89	6,04	6,12	6,23	5,76
Sulawesi Selatan	2,53	2,63	2,69	2,80	2,92	2,99	3,03	3,09	2,84
Pulau Maluku dan Papua	2,44	2,35	2,31	2,21	2,35	2,42	2,41	2,47	2,37
Papua	1,38	1,30	1,25	1,15	1,29	1,37	1,37	1,41	1,32
INDONESIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah.

1.2 Perumusan Masalah

Implikasi otonomi daerah diharapkan dapat menjadi lebih baik dalam hal pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu implikasi tersebut yakni adanya kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang mengalami perubahan nilai PDRB riil akibat unsur laju pertumbuhan PDB nasional, bauran industri, keunggulan kompetitif dan pertumbuhan total PDRB di DKI Jakarta?
2. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang diidentifikasi sebagai sektor basis di DKI Jakarta yaitu sektor yang memiliki PDRB lebih tinggi dari rata-rata nasional?
3. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang perlu menjadi prioritas berdasarkan basis dan potensinya dalam meningkatkan PDRB di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan di DKI Jakarta dari sisi penghasil PDRB. Selain itu akan dianalisis kinerja sektor ekonomi unggulan

tersebut, dilihat dari pertumbuhan maupun daya saingnya sehingga dapat dilihat sektor unggulan mana yang perlu lebih diprioritaskan oleh pemerintah provinsi dan rekomendasi kebijakan pengembangannya agar turut membantu upaya pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi DKI Jakarta, berbagai literatur, internet, dan sumber-sumber lainnya. Pada tulisan ini, untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan digunakan analisis *Location Quotient*. Sedangkan untuk melihat kinerja sektor ekonomi unggulan digunakan analisis *Shift Share*.

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup skala Regional pada provinsi DKI Jakarta dengan mengambil tahun acuan penelitian antara tahun 2011-2018 untuk analisis dengan menggunakan *Shift Share* dan tahun 2014-2018 untuk analisis dengan menggunakan *Location Quotient*.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

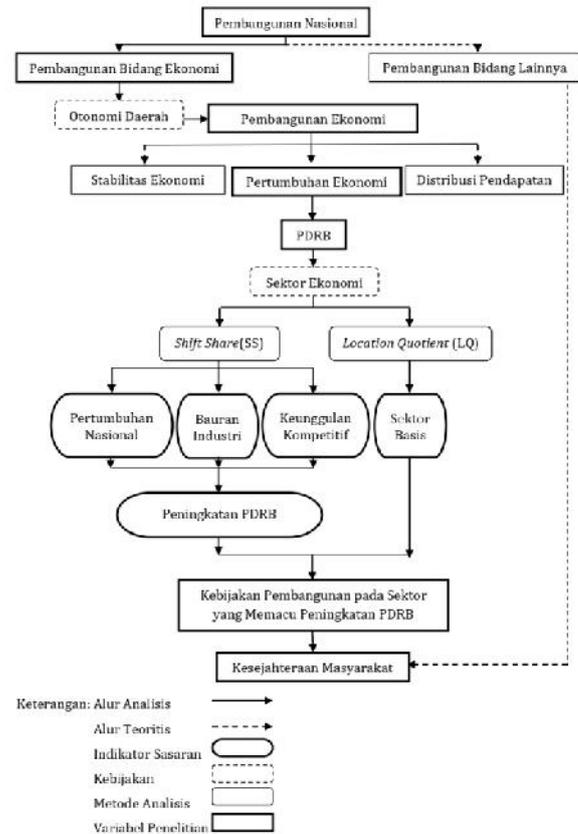
2.1 Kerangka Teoritis

Pembangunan nasional pada hakikatnya tidak hanya terkait dengan indikator ekonomi saja. Melainkan terbagi dalam berbagai bidang yang tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Akan tetapi, pembangunan nasional yang selalu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah

pembangunan bidang ekonomi dalam skala pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah pusat tidak senantiasa dapat membuat kebijakan-kebijakan ekonomi sebagai implementasi dari pembangunan ekonomi nasional yang dapat berpengaruh dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum baik di perkotaan maupun di pedesaan terlebih di pedalaman. Oleh karenanya, perlu peran serta dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang secara riil mengetahui segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh daerahnya. Adanya penyelenggaraan otonomi daerah semenjak bergulirnya era reformasi di awal abad 21 menandakan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melibatkan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sehingga dengan adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah lebih leluasa untuk fokus dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah yang umumnya dicerminkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Dalam hal ini, implementasi pengendalian stabilitas ekonomi baik di pusat hingga daerah dilakukan oleh bank sentral maupun perwakilannya di daerah dikarenakan adanya keterkaitan dengan kebijakan moneter.

Penerapan kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi daerah secara umum diklasifikasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi untuk memudahkan analisis dalam pengambilan kebijakan/keputusan sektor ekonomi apa saja yang layak untuk diprioritaskan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah untuk dijadikan basis ekonomi daerah. Selanjutnya, perlu adanya kebijakan pemerintah daerah mengenai program pembangunan pada sektor ekonomi yang menghasilkan PDRB yang besar sebagai implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam merespon analisis yang terkait dengan paparan di atas untuk melakukan tindakan nyata dalam mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka teoritis maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Sektor tersier mengalami perubahan nilai PDRB riil signifikan akibat unsur laju pertumbuhan PDB nasional, bauran industri, keunggulan kompetitif dan pertumbuhan total PDRB di DKI Jakarta.
2. Sektor tersier diidentifikasi sebagai sektor basis di DKI Jakarta yaitu sektor yang memiliki PDRB lebih tinggi dari rata-rata nasional.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Seleksi Data dan Definisi Operasional Variabel

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian analisis deskriptif kuantitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Data PDB Indonesia tahun 2011-2018
2. Data PDRB DKI Jakarta tahun 2011-2018

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan sumber lain serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

PDB/PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara/provinsi dalam suatu periode tertentu. PDB yang akan dibahas adalah PDB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut sektor ekonomi antara tahun 2011-2018 dengan satuan rupiah.

Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan Tahun Dasar 2010 telah menjabarkan lebih banyak Lapangan Usaha dari yang semula 9 (sembilan) Lapangan Usaha menjadi 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha. Akan tetapi dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, terkait penggolongan jenis sektor tetap menjadi 3 (tiga) jenis diantaranya sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dengan perincian sebagai berikut (lihat Tabel 3):

Tabel 3. Pemetaan Lapangan Usaha/Sektor Ekonomi kepada Jenis Sektor

No.	Jenis Sektor	No.	Lapangan Usaha/Sektor Ekonomi
1	Sektor Primer	1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		2	Pertambangan, dan Penggalian
2	Sektor Sekunder	3	Industri Pengolahan
		4	Pengadaan Listrik, dan Gas
		5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
		6	Konstruksi
3	Sektor Tersier	7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
		8	Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum
		9	Transportasi, dan Pergudangan
		10	Informasi, dan Komunikasi
		11	Jasa Keuangan, dan Asuransi
		12	Real Estate
		13	Jasa Perusahaan
		14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
		15	Jasa Pendidikan
		16	Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial
		17	Jasa Lainnya

3.2.1 Metode Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk menunjukkan sektor ekonomi yang berkembang di provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional. Dalam hal ini, analisis *Shift Share* melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan terutama melihat perbedaan pertumbuhan skala wilayah yang lebih luas (wilayah referensi) maupun dalam skala wilayah yang lebih kecil. Analisis ini juga menggambarkan *performance* (kinerja) perekonomian DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah bila wilayah tersebut memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional. Selain itu, Analisis ini juga membandingkan laju pertumbuhan perekonomian nasional beserta sektor-sektornya yang mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan tersebut. Apabila penyimpangan tersebut positif, hal tersebut menandakan terdapat keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

$$y_{it} - y_{io} = \Delta y = y_{io} \{ [Y_t/Y_o] - 1 \} + y_{io} \{ [y_{it}/y_{io}] - [Y_t/Y_o] \} + y_{io} \{ [y_{it}/y_{io}] - [Y_t/Y_o] \}$$

dimana komponen:

$$y_{io} \{ [Y_t/Y_o] - 1 \}$$

= unsur pertumbuhan nasional = [G]

$$y_{io} \{ [Y_{it}/Y_{io}] - [Y_t/Y_o] \}$$

= unsur bauran industri = [M]

$$y_{io} \{ [y_{it}/y_{io}] - [Y_{it}/Y_{io}] \}$$

= unsur keunggulan kompetitif = [S]

Perhitungan analisis *Shift Share* diperoleh dengan menjumlahkan ketiga komponen diatas dan hasilnya harus sama dengan total perubahan dari data industri/sektor yang ada di daerah (ΔY) (Bendavid, 1991) yang dalam hal ini adalah provinsi DKI Jakarta.

$$\Delta y = \text{Pertumbuhan total PDRB Provinsi DKI Jakarta selama periode } t \text{ (rupiah)}$$

$$y_{io} = \text{Jumlah PDRB sektor } i \text{ Provinsi DKI Jakarta ditahun awal (rupiah)}$$

$$y_{it} = \text{Jumlah PDRB sektor } i \text{ Provinsi DKI Jakarta ditahun akhir (rupiah)}$$

$$Y_{io} = \text{Jumlah PDB sektor } i \text{ nasional ditahun awal (rupiah)}$$

$$Y_{it} = \text{Jumlah PDB sektor } i \text{ nasional ditahun akhir (rupiah)}$$

$$Y_o = \text{Jumlah total PDB nasional ditahun awal (rupiah)}$$

3.2 Metode Analisis Data

Y_t = Jumlah total PDB nasional ditahun akhir (rupiah)

interpretasi (Bendavid, 1991):

- Nilai dari tiap komponen *Shift Share* (G+S+M) dapat dijadikan acuan dalam analisis.
- Jika nilai dari komponen *Shift* dari suatu sektor positif (+) maka sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang relatif maju dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional.
- Jika pergeseran diferensial (Komponen S) dari suatu sektor positif (+) maka sektor tersebut mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian nasional.

3.2.2 Metode Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi (Wibisono, 2003). Disamping itu, LQ adalah suatu indeks untuk mengukur tingkat spesialisasi (relatif) suatu sektor atau subsektor ekonomi suatu wilayah tertentu. (Bendavid, 1991). Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB wilayah yang dititikberatkan pada kegiatan dalam sektor ekonomi sekunder dan tersier. Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier yang dicerminkan oleh PDRB di wilayah yang sedang diteliti dengan kemampuan sektor ekonomi yang sama untuk PDRB pada wilayah yang lebih luas atau yang lebih tinggi jangkauannya.

Kontribusi sektor ekonomi sekunder dan tersier di provinsi DKI Jakarta digunakan formulasi model LQ sebagai berikut:

$$LQ = \frac{L_{ij} / L_j}{L_i / L}$$

LQ = *Location Quotient*

L_{ij} = PDRB sektor i Provinsi DKI Jakarta (rupiah)

L_j = PDRB Provinsi DKI Jakarta (rupiah)

L_i = PDB sektor i nasional (rupiah)

L = PDB nasional (rupiah)

kriteria yang digunakan adalah:

- Bila $LQ > 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis/sektor ekspor, yang artinya bahwa sektor tersebut mampu menghasilkan PDRB relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional.

- Bila $LQ < 1$, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor nonbasis/sektor lokal, yang artinya bahwa sektor tersebut secara proporsional hanya mampu menghasilkan PDRB relatif lebih rendah dari rata-rata nasional.

Untuk menentukan sektor basis, selain menggunakan LQ sebagai metode analisis data, juga dapat menggunakan Metode Pendekatan Kebutuhan Minimum (MPKM). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Ullman dan Dacey pada tahun 1960 (McCann, 2001). Dalam MPKM, daerah yang diteliti dibandingkan dengan daerah yang memiliki ukuran yang relatif sama dan ditetapkan sebagai daerah memiliki kebutuhan minimum PDB/PDRB di sektor ekonomi tertentu. Pada awalnya daerah-daerah yang berukuran relatif sama dengan daerah yang diteliti tersebut dipilih terlebih dahulu. Untuk setiap daerah, kemudian dihitung persentase PDB/PDRB yang diperoleh pada setiap sektor ekonomi. Kemudian, angka-angka persentase tersebut diperbandingkan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Persentase PDB/PDRB terkecil (yang paling minimum) dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi sektor ekonomi tertentu dan sekaligus sebagai batas untuk menentukan sektor basis dan non-basis. Rumus yang digunakan adalah:

$$MPKM = \frac{E_{ir} / E_{im}}{E_r / E_m}$$

$MPKM$ = Metode Pendekatan Kebutuhan Minimum

E_{ir} = PDB/PDRB sektor i di daerah yang diteliti

E_r = PDB/PDRB total semua sektor di daerah yang diteliti

E_{im} = PDB/PDRB sektor i di daerah yang memiliki batas minimum PDB/PDRB

E_m = PDB/PDRB total semua sektor di daerah yang memiliki batas minimum PDB/PDRB

Kelemahan metode ini lebih sulit untuk diterapkan terutama di negara-negara yang memiliki banyak daerah administratif. Selain itu, menurut Budiharsono (2001) apabila masing-masing sektor tersebut dipecah lagi menjadi sektor-sektor yang lebih terperinci maka akan mengakibatkan hampir semua sektor merupakan sektor basis. Sedangkan keunggulan dengan menggunakan metode ini, dapat diperoleh informasi terkait besaran nilai dan jenis sektor ekonomi dengan persentase PDB/PDRB terkecil (paling minimum) yang akan menjadi acuan dari ukuran kebutuhan minimum dan menjadi acuan

batas untuk menentukan sektor basis dan non-basis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis *Shift-Share* dan *Loqation Quotient (LQ)*

Analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti nilai tambah yang dalam hal ini adalah PDRB/Kesempatan Kerja pada dua

titik periode waktu yaitu tahun 2011 dan 2018 di wilayah DKI Jakarta. Analisis ini untuk menunjukkan sektor-sektor yang berkembang di DKI Jakarta dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional. Dalam hal ini, analisis *Shift Share* melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan terutama melihat perbedaan pertumbuhan skala wilayah yang lebih luas (wilayah referensi) maupun dalam skala wilayah yang lebih kecil. Hasil perhitungan *Shift Share* DKI Jakarta tahun 2011 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Shift-Share* (SS) Sektor Ekonomi DKI Jakarta Berdasarkan PDRB ADHK 2010 Tahun 2011 dan 2018

(Rupiah)

Lapangan Usaha	G	M	S	Y
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	511.523.820.554	-109.048.427.341	-285.363.393.213	117.112.000.000
Pertambangan, dan Penggalian	1.213.185.357.331	-1.020.863.387.519	-281.802.969.813	-89.481.000.000
Industri Pengolahan	62.571.075.520.769	-5.631.369.724.286	6.564.459.203.517	63.504.165.000.000
Pengadaan Listrik dan Gas	1.384.818.912.262	-12.515.003.056	398.045.090.794	1.770.349.000.000
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	226.304.631.109	-14.417.735.744	-26.230.895.365	185.656.000.000
Konstruksi	64.182.920.327.953	21.331.498.962.792	-29.889.110.290.745	55.625.309.000.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	77.601.120.479.284	-8.037.690.558.430	12.724.474.079.147	82.287.904.000.000
Transportasi dan Pergudangan	12.848.078.952.308	7.601.654.340.406	8.787.077.707.286	29.236.811.000.000
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.078.605.823.814	4.098.597.471.539	975.051.704.647	28.152.255.000.000
Informasi dan Komunikasi	36.338.087.888.274	46.502.447.063.990	15.487.065.047.736	98.327.600.000.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	45.910.640.744.854	25.228.855.385.241	-2.196.027.130.096	68.943.469.000.000
Real Estate	31.781.889.209.925	441.102.714.765	18.653.075.310	32.241.645.000.000
Jasa Perusahaan	31.421.953.336.913	26.171.287.083.114	3.433.396.579.973	61.026.637.000.000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.749.750.450.738	-8.385.974.017.937	-10.270.269.432.800	6.093.507.000.000
Jasa Pendidikan	23.501.920.401.594	5.441.828.633.551	-7.121.373.035.145	21.822.376.000.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.115.539.042.566	3.830.752.249.191	-44.904.291.758	10.901.387.000.000
Jasa Lainnya	15.136.279.388.945	11.160.081.101.211	2.194.330.509.844	28.490.691.000.000

Sumber: Olah data menggunakan Excel metode *Shift Share*

Dimana komponen:

G = unsur pertumbuhan nasional

M = unsur bauran industri

S = unsur keunggulan kompetitif

Y = pertumbuhan total PDRB

Terkait dengan kontribusi PDRB yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi, berdasarkan hasil analisis *Shift Share* yang melibatkan 4 (empat)

komponen diantaranya adalah komponen unsur pertumbuhan PDB nasional, komponen unsurbauran industri dan komponen unsur keunggulan kompetitif serta komponen pertumbuhan total PDRB pada masing-masing sektor ekonomi. Penjelasan berikutnya menguraikan 3 (tiga) sektor ekonomi sebagai peringkat tertinggi pada masing-masing komponen pada analisis *Shift Share*. Pada komponen unsur pertumbuhan PDB nasional, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi andalan bagi peningkatan PDRB DKI Jakarta dengan nilai pertumbuhan PDRB sebesar Rp. 77.601.120.479.284. Selanjutnya, sektor Konstruksi menempati urutan kedua dengan nilai pertumbuhan PDRB sebesar Rp. 64.182.920.327.953. Kemudian, sektor Industri Pengolahan menempati angka pertumbuhan PDRB urutan ketiga sebesar Rp. 62.571.075.520.769. Untuk komponen unsur bauran industri, pertumbuhan PDRB masih didominasi oleh sektor tersier yakni sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai pertumbuhan PDRB bauran industri sebesar Rp. 46.502.447.063.990. Selanjutnya, sektor Jasa Perusahaan; dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menempati urutan kedua dan ketiga dengan nilai pertumbuhan PDRB bauran industri

sebesar Rp. 26.171.287.083.114 dan Rp. 25.228.855.385.241. Hal ini menjelaskan bahwa dalam komponen bauran industri, sektor tersier masih mengungguli sektor lainnya. Dalam komponen unsur keunggulan kompetitif. Pertumbuhan PDRB bersumber dari sektor Informasi dan Komunikasi; sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai pertumbuhan PDRB sebesar Rp. 15.487.065.047.736; Rp. 12.724.474.079.147; dan Rp. 8.787.077.707.286. Sedangkan pada komponen pertumbuhan total PDRB, sektor Informasi dan Komunikasi menghasilkan pertumbuhan total tertinggi sebesar Rp. 98.327.600.000.000. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 82.287.904.000.000, dan komponen pertumbuhan total PDRB tertinggi ketiga dihasilkan oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp. 68.943.469.000.000.

Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 5 untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana saja di DKI Jakarta yang merupakan sektor basis maupun sektor nonbasis.

Tabel 5. Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Sektor Ekonomi DKI Jakarta Berdasarkan PDRB ADHK 2010 Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pertambangan, dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58
Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,25	0,23	0,25	0,28	0,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,56	0,53	0,52	0,50	0,51	0,52
Konstruksi	1,39	1,33	1,27	1,23	1,19	1,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,18	1,16	1,16	1,15	1,16	1,16
Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,79	0,81	0,81	0,81	0,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,61	1,61	1,59	1,57	1,60
Informasi dan Komunikasi	2,03	2,01	2,01	2,00	2,02	2,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,66	2,67	2,64	2,61	2,55	2,63
Real Estate	2,21	2,19	2,16	2,15	2,14	2,17
Jasa Perusahaan	4,37	4,30	4,31	4,33	4,28	4,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,20	1,19	1,10	1,12	1,17
Jasa Pendidikan	1,54	1,50	1,50	1,45	1,44	1,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,45	1,44	1,46	1,43	1,41	1,44
Jasa Lainnya	2,17	2,13	2,12	2,09	2,06	2,12

Sumber: Olah data menggunakan Excel metode *Shift Share*

Demikian halnya pada rata-rata hasil analisis indeks LQ antara tahun 2014-2018 yang menguraikan 3 (tiga) sektor ekonomi sebagai peringkat tertinggi pada analisis LQ. Dari hasil rata-rata indeks LQ yang ada, DKI Jakarta mempunyai 11 sektor ekonomi yang memiliki LQ>1 dan diperoleh 3 (tiga) sektorekonomi terbesar, diantaranya yaitu sektor Jasa Perusahaan memiliki rata-rata indeks LQ sebesar 4,32 sehingga sektor ini merupakan sektor basis dengan indeks terbesar. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan sektor basis terbesar kedua dengan rata-rata indeks LQ sebesar 2,17. Sektor basis terbesar ketiga yaitu sektor Real Estate yang memiliki rata-rata indeks LQ sebesar 2,17. Dengan demikian sektor tersier (kecuali sektor Transportasi dan Pergudangan) dan sebagian sektor sekunder (hanya sektor konstruksi) merupakan sektor basis dalam meningkatkan PDRB

di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sebelas sektor ekonomi (terutama 3 sektor ekonomi dengan hasil rata-rata LQ terbesar) tersebut memiliki kekuatan dan dominasi ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PDRB di DKI Jakarta sehingga sebelas sektor tersebut merupakan sektor potensial yang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dalam menghasilkan PDRB.

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode *Shift Share* dan LQ, selanjutnya dapat dipetakan sektor-sektor ekonomi apa saja yang dapat menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka menghasilkan PDRB provinsi DKI Jakarta yang lebih besar. Berikut pemetaan sektor-sektor ekonomi dari hasil 2 (dua) metode analisis yang telah dilakukan (lihat Tabel 6).

Tabel 6. Pemetaan Sektor Ekonomi Berdasarkan Hasil Analisis *Shift Share* dan *Location Quotient* (LQ)

<i>Shift Share</i>				<i>Location Quotient</i>
G	M	S	Y	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Informasi dan Komunikasi	Informasi dan Komunikasi	Informasi dan Komunikasi	Jasa Perusahaan
Konstruksi	Jasa Perusahaan	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Jasa Keuangan dan Asuransi
Industri Pengolahan	Jasa Keuangan dan Asuransi	Transportasi dan Pergudangan	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate

Sumber: Rekapitulasi hasil olah data metode *Shift Share* dan *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan pemetaan terhadap hasil perhitungan *Shift Share* melalui komponen unsur pertumbuhan nasional, unsur bauran industri, unsur keunggulan kompetitif dan unsur pertumbuhan total PDRB serta berdasarkan pemetaan terhadap hasil perhitungan *Location Quotient* maka diperoleh sektor-sektor ekonomi mana saja yang dapat menjadi prioritas berdasarkan basis dan potensinya dalam meningkatkan PDRB di DKI Jakarta. Berikut diantaranya:

- a) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

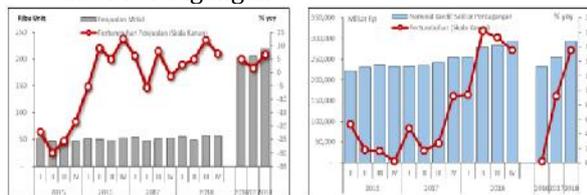
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta dengan nilai kontribusi sebesar 16,93 persen ditahun 2018. Nilai ini lebih besar dari yang diberikan pada tahun 2016 yang sebesar 16,60 persen dan dari nilai tahun 2017 yang sebesar 16,68 persen. Sepanjang

tahun 2014-2018 rata-rata nilai tambah yang tercipta di sektor ekonomi ini adalah Rp 365,57 triliun per tahun atau sekitar 16,82 persen dari PDRB DKI Jakarta (BPS, 2019).

Akselerasi pertumbuhan sektor perdagangan tercermin pada penjualan mobil di DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2018, penjualan mobil di ibukota tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,65 persen (yoy). Penjualan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 yang hanya mencatat pertumbuhan 1,58 persen (yoy) (lihat Gambar 2). Meningkatnya pertumbuhan penjualan mobil sepanjang tahun 2018 tersebut didorong oleh rilis beberapa merk dan tipe mobil, khususnya jenis MPV yang memiliki pangsa pasar paling dominan. Dari sisi pembiayaan, aktivitas perdagangan yang lebih tinggi ditahun 2018 juga tercermin dari penyaluran kredit kepada sektor perdagangan. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit kepada debitur yang bergerak

di sektor perdagangan eceran tercatat tumbuh 15,52 persen (yoy) (lihat Gambar 2). Realisasi pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 9,21 persen (yoy). Lebih lanjut, persiapan dan penyelenggaraan *Asian Games* 2018 lalu berdampak positif pada peningkatan aktivitas perdagangan. Peran ajang tersebut dalam mendorong aktivitas perdagangan salah satunya tercermin dari tingginya animo masyarakat terhadap souvenir atau pernak-pernik tematis *Asian Games*. Tingginya animo tersebut terlihat dari catatan penjualan di pusat souvenir di kawasan Gelora Bung Karno mampu mencapai 1.500-3.000 barang per hari. (BI, 2019)

Gambar 2. Pertumbuhan Penjualan Mobil di DKI Jakarta dan Pertumbuhan Penyaluran Kredit ke Sektor Perdagangan



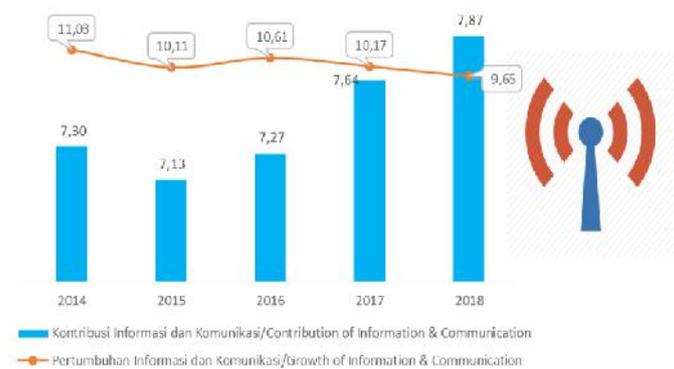
Sumber: Gaikindo dan Bank Indonesia

b) Sektor Informasi dan Komunikasi

Perekonomian DKI Jakarta secara perlahan mulai bergeser dari kelompok sektor primer dan sekunder ke kelompok sektor tersier. Sebagai contoh, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Kendaraan Bermotor kontribusinya terus bertambah dari sebesar 16,68 persen ditahun 2017 menjadi 16,93 persen ditahun 2018, begitu juga dengan sektor Informasi dan Komunikasi bertambah dari sebesar 7,64 persen ditahun 2017 menjadi 7,87 persen ditahun 2018. Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki peran yang strategis pada era digitalisasi saat ini. Kemajuan teknologi yang dicapai oleh sektor ekonomi ini turut andil dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Selama tahun 2014-2018 rata-rata besarnya nilai tambah sektor ekonomi ini adalah Rp.162,54 triliun per tahun atau sekitar 7,44 persen dari PDRB DKI Jakarta. Peranan sektor Informasi dan Komunikasi selama 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan tren yang cenderung naik. Laju pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2018 tumbuh 9,65 persen, turun jika dibandingkan capaian ditahun 2017 yang sebesar 10,17 persen. Pertumbuhan tertinggi sektor Informasi dan Komunikasi terjadi pada tahun 2014 dan 2016 yang mencapai 11,03 persen dan 10,61 persen (BPS, 2019). Pertumbuhan yang tinggi pada sektor Informasi dan Komunikasi tersebut

didorong oleh peningkatan aktivitas seluler, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan layanan jasa yang menggunakan *platform* digital.

Gambar 3. Peranan dan Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Informasi dan Komunikasi (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

c) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terdiri atas subsektor Bank/Jasa Perantara Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya, dan Jasa Penunjang Keuangan. Sepanjang periode tahun 2014-2018 rata-rata besarnya nilai tambah per tahun sektor ekonomi ini adalah Rp. 225,99 triliun, atau sekitar 10,38 persen dari total PDRB DKI Jakarta. Bila dilihat struktur dalam sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, kontribusi terbesar terhadap terbentuknya nilai tambah sektor ekonomi ini diberikan oleh subsektor Jasa Perantara Keuangan. Pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan oleh subsektor ini sebesar 51,10 persen, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 53,61 persen, dan pada tahun 2018 kembali terkoreksi menjadi 52,93 persen terhadap total nilai tambah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Penurunan kontribusi pada subsektor Jasa Perantara Keuangan ini merupakan pengaruh dari kenaikan kontribusi yang diberikan oleh subsektor Asuransi dan Dana Pensiun. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan subsektor Asuransi dan Dana Pensiun adalah 32,91 persen dari total nilai tambah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Kemudian pada tahun 2018 kontribusinya naik tipis pada level 33,72 persen. Sementara pada subsektor Jasa Penunjang Keuangan pada tahun 2018 kontribusinya hanya mencapai 4,23 persen terhadap total nilai tambah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Dari sisi laju pertumbuhan, pola pertumbuhan yang dimiliki oleh sektor ekonomi ini cukup fluktuatif. Tumbuh sebesar 4,02 persen pada tahun 2014, pada tahun 2016 pertumbuhannya naik hingga 8,79 persen, kemudian tahun 2017

pertumbuhannya kembali turun menjadi 5,94 persen, dan kembali menurun 2,66 persen pada tahun 2018. Laju pertumbuhan yang dicapai oleh sektorekonomi ini sangat dipengaruhi oleh lajupertumbuhan yang dicapai oleh subsektor Jasa Perantara Keuangan. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan yang dicapai oleh subsektor Jasa Perantara Keuangan adalah 9,85 persen, jauh lebih lambat dari yang dicapai pada tahun 2015 yang sebesar 15,45 persen. Sementara ditahun 2017 kembali melambat menjadi 5,19 persen. Pada tahun 2018 pertumbuhan subsektor Jasa Perantara Keuangan tercatat positif 1,11 persen (BPS, 2019).

Gambar 4. Peranan dan Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (persen)



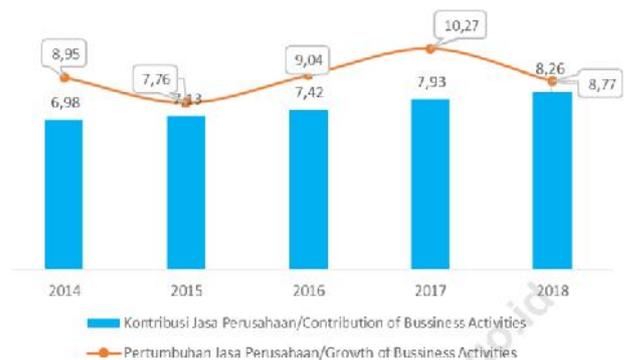
Sumber: Badan Pusat Statistik

d) Sektor Jasa Perusahaan

Sektor berikutnya yang juga memiliki kinerja cukup stabil di DKI Jakarta selama periode waktu tahun 2014-2018 adalah sektor Jasa Perusahaan. Perkembangan kegiatan ekonomi turut mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi yang melayani usaha/perusahaan. Selama periode tersebut rata-rata nilai tambah yang dihasilkan sektor Jasa Perusahaan per tahun adalah sebesar Rp. 165,41 triliun, atau sekitar 7,54 persen dari total PDRB DKI Jakarta. Bila diperhatikan kontribusinya setiap tahun terlihat bahwa sektor ekonomi ini terus menunjukkan peningkatan kontribusi. Pada tahun 2014 menyumbang 6,98 persen, tahun 2015 menyumbang 7,13 persen dan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 kontribusinya terus meningkat menjadi 7,42 persen, 7,93 persen dan 8,26 persen dari PDRB DKI Jakarta. Di lain sisi, laju pertumbuhan yang dicapai oleh sektor Jasa Perusahaan cukup berfluktuatif. Setelah sempat menunjukkan pelemahan pertumbuhan pada tahun 2014 dan 2016, pada tahun 2017 pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 10,27 persen, kemudian kembali tumbuh

melambat 8,77 persen ditahun 2018. Fenomena perkembangan sektor Jasa Perusahaan cukup fluktuatif ini dipengaruhi oleh aktifitas perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di DKI Jakarta. Wajar jika suasana ekonomi global, kurs mata uang, dan politik mempengaruhi perkembangan di sektor ekonomi ini (BPS, 2019).

Gambar 5. Peranan dan Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Jasa Perusahaan (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

e) Sektor Industri Pengolahan

Penyumbang PDRB terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,15 persen ditahun 2018. Nilai tambah industri pengolahan selama kurun waktu 2014-2018 rata-rata mencapai Rp. 292,76 triliun per tahun dengan rata-rata kontribusi mencapai 13,48 persen dari PDRB DKI Jakarta. Pada tahun 2018, subsektor yang memiliki peranan terbesar adalah subsektor Industri Alat Angkut yaitu sebesar 56,25 persen dari seluruh nilai tambah industri pengolahan pada tahun 2018, kemudian diikuti oleh subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan subsektor Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 11,18 persen dan 7,38 persen. Kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi ini pada tahun 2018 lebih kecil dari yang dicapai pada tahun 2016 yang sebesar 13,47 persen dan dari tahun 2017 yang sebesar 13,42 persen (BPS, 2019). Melambatnya pertumbuhan sektor IndustriPengolahan terindikasi dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta selama tahun 2018 sehingga berdampak pada berkurangnya output produksi industri yang memproduksi bahan-bahan dasar konstruksi. Pengaruh berkurangnya kegiatan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan sektor Industri Pengolahan masih dapat dikompensasi oleh tumbuhnya kegiatan perdagangan, sejalan dengan menguatnya konsumsi rumah tangga ditahun 2018 (Bank Indonesia, 2019). Kontribusi kegiatan perdagangan tersebut

mampu menjaga pertumbuhan sektor Industri Pengolahan di DKI Jakarta sehingga tidak melambat lebih dalam.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan pada tahun 2018 adalah sebesar 5,68 persen. Sedangkan subsektor ekonomi yang mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi adalah subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 14,69 persen, disusul oleh subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya yaitu sebesar 11,33 persen, kemudian diikuti oleh subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yaitu sebesar 11,07 persen, dan subsektor Industri Barang Galian bukan Logam sebesar 9,78 persen (BPS, 2019).

Gambar 6. Peranan dan Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

f) Sektor Konstruksi

Kontribusi PDRB terbesar ketiga diberikan oleh sektor Konstruksi. Sektor Konstruksi menjadi salahsatu sektor ekonomi andalan bagi DKI Jakarta. Rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh sektor Konstruksi per tahun selama periode 2014-2018 adalah sebesar Rp. 274,56 triliun, atau sekitar 12,68 persen dari PDRB DKI Jakarta. Bila dicermati perkembangan dari tahun ke tahun kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi ini terhadap PDRB DKI Jakarta cenderung mengalami tren melandai. Namun demikian, nilainya masih diatas 12 persen. Bila pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 13,34 persen, pada tahun 2016, 2017 dan 2018 kontribusinya berkurang menjadi 12,52 persen, 12,32 persen dan 12,11 persen. Laju pertumbuhan yang dicapai oleh sektor Konstruksi selama periode yang sama cukup berfluktuatif. Kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2014 sektor ekonomi ini mencapai pertumbuhan sebesar 4,97persen, lebih tinggi dari tahun 2015 yang sebesar 3,99 persen dan

tahun 2017 yang sebesar 5,12 persen, dan pada tahun 2018 pertumbuhan sektor Konstruksi kembali menurun menjadi sebesar 3,37 persen (BPS, 2019).

Akan tetapi aktivitas pembangunan infrastruktur utama di DKI Jakarta tetap berlangsung sehingga mampu menopang perekonomian. Ini dikarenakan juga kondisi wilayah DKI Jakarta yang masih memprioritaskan pada pembangunan konstruksi dan perbaikan fisik seperti gedung-gedung perkantoran, perbelanjaan, hotel dan apartemen tempat tinggal, sarana umum sosial, fasilitas umum seperti, rumah susun sewa, jalan raya, dan jembatan (*fly over* dan *under pass*), seperti pembangunan MRT (ruas Lebak Bulus-Bundaran HI) dan LRT (yang meliputi ruas Cawang-Cibubur, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Cawang-Bekasi Timur) meskipun telah memasuki fase akhir pembangunan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur transportasi massal lainnya, yaitu Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung masih dalam proses pelaksanaan yang progres pelaksanaannya sudah mencapai 8 persen. Beberapa ruas jalan tol juga tengah dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas di dalam kota maupun konektivitas dengan daerah penyangga. Beberapa proyek tersebut antara lain, pembangunan 6 ruas tol dalam kota Jakarta sepanjang 69,8 km yang secara umum mencapai kemajuan 17,4persen dengan fokus pengerjaan pada ruas Sunter-Pulo Gebang. Lebih lanjut, beberapa ruas tol lain yang juga sedang dikerjakan antara lain tol Jakarta-Cikampek Elevated, Cengkareng-Batu Ceper, dan Cibitung-Cilincing.

Gambar 7. Peranan dan Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Konstruksi (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

g) Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor Transportasi dan Pergudangan terdiri atas subsektor Angkutan Rel, Angkutan

Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara, dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Nilai tambah yang tercipta dari sektor ekonomi ini selama kurun waktu tahun 2014-2018 rata-rata mencapai Rp. 75,49 triliun per tahun, atau sekitar 3,45 persen dari PDRB DKI Jakarta. Pada tahun 2018, subsektor Angkutan Darat berkontribusi 45,01 persen terhadap pembentukan nilai tambah sektor Transportasi dan Pergudangan, sedangkan subsektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir dan subsektor Angkutan Laut masing-masing berkontribusi 32,62 persen dan 7,68 persen. Satu hal yang menarik adalah peningkatan kontribusi yang ditunjukkan oleh subsektor Angkutan Udara. Pada tahun 2014 subsektor ekonomi ini hanya berkontribusi kurang dari 7 persen dan pada tahun 2018 kontribusinya meningkat menjadi 13,82 persen. Peningkatan ini didorong oleh padatnya penerbangan pesawat di Bandar udara Halim Perdanakusuma sebagai Bandar udara komersial semenjak tahun 2014 dan hingga saat ini jumlah penerbangan domestik yang melalui Bandar udara ini masih terus mengalami peningkatan (BPS, 2019).

Selain itu, salah satu bentuk jasa dengan dengan *platform* digital yang marak digunakan warga ibukota saat ini adalah jasa transportasi berbasis aplikasi. Kemudahan dan kepraktisan mendapatkan armada transportasi serta efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai ke suatu tempat menjadi faktor yang mendorong warga Ibukota memiliki ketergantungan terhadap teknologi tersebut dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak mulai ramainya bisnis transportasi *online* sejak tahun 2014. Semakin pesatnya pertumbuhan pengguna transportasi berbasis aplikasi tersebut berdampak pada akselerasi pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan, yang juga mencatat pertumbuhan yang tinggi hingga mencapai 8,99 persen pada tahun 2018.



Sumber: Badan Pusat Statistik

h) Sektor Real Estate

Sektor Real Estat menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki tren kinerja melandai di DKI Jakarta. Selama tahun 2014-2018 rata-rata nilai tambah per tahun yang diciptakan oleh sektor ekonomi ini sekitar Rp.134,74 triliun atau sekitar 6.21 persen terhadap PDRB DKI Jakarta. Bila diikuti perkembangannya dari tahun ke tahun, kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi ini terhadap PDRB DKI Jakarta juga cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 kontribusinya mencapai 6.34 persen, namun pada tahun 2016 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 6.20 persen dan 6.06 persen pada tahun 2018. Namun demikian, Penurunan kontribusi tersebut, mampu diimbangi dengan percepatan pertumbuhan yang dialami oleh sektor Real Estat. Pertumbuhan yang sedemikian cepat sejak awal tahun 2000-an mulai mendekati titik jenuh semenjak tahun 2013. Disamping harga real estat yang kompetitif di DKI Jakarta, juga pelaku usaha real estat lebih tertarik untuk memilih usaha diluar DKI Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, Depok. Bila pada tahun 2015 sektor ekonomi ini tumbuh 4.72 persen dan pada tahun 2016 dan 2018 pertumbuhannya melambat menjadi 4.69 persen dan 4.51 persen (BPS, 2019).

Gambar 9. Peranan dan Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Real Estate (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 8. Peranan dan Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Transportasi dan Pergudangan (persen)

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa sepanjang kurun waktu sejak tahun 2011

terutama 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018), belum terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti di DKI Jakarta. Kelompok sektor ekonomi yang mendominasi pembentukan PDRB DKI Jakarta diatas 10 persen tersebut adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Konstruksi, sektor Industri Pengolahan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan sektor Informasi dan Komunikasi. Rata-rata nilai kontribusi kelima kategori tersebut secara berturut-turut adalah 16.11 persen, 13.06 persen, 12.75 persen, 10.67 persen dan 10.14 persen. Total kelimanya mencapai 62.72 persen dari total PDRB DKI Jakarta. Selanjutnya, sektor tersier masih menjadi andalan bagi perekonomian DKI Jakarta, dengan rata-rata kontribusi 73.60 persen selama tahun 2014-2018. Setelah itu diikuti oleh sektor sekunder dan primer dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 26.12 persen dan 0.28 persen. Struktur ekonomi yang demikian membuat perekonomian DKI Jakarta masih berpotensi untuk berkembang lebih luas dan tumbuh lebih cepat sejalan dengan semakin berkembangnya infrastruktur dan gaya hidup masyarakat DKI Jakarta.

Tabel 7. Rata-rata Kontribusi Sektor Ekonomi dan Jenis Sektor Terhadap PDRB DKI Jakarta Tahun 2014-2018 (Persen)

Lapangan Usaha	Rata-Rata	Jenis Sektor	Rata-Rata
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09	Sektor Primer	0,28
2 Pertambangan, dan Penggalian	0,19		
3 Industri Pengolahan	12,75	Sektor Sekunder	26,12
4 Pengadaan Listrik dan Gas	0,27		
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04		
6 Konstruksi	13,06		
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,11		
8 Transportasi dan Pergudangan	3,30	Sektor Tersier	73,60
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98		
10 Informasi dan Komunikasi	10,14		
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	10,67		
12 Real Estate	6,63		
13 Jasa Perusahaan	7,59		
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13		
15 Jasa Pendidikan	4,78		
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63		
17 Jasa Lainnya	3,65		

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pada analisis *Shift-Share* dan *Location Quotient* (LQ) tahun 2011-2018, diperoleh sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai PDRB DKI Jakarta tertinggi dan sektor basis. Selanjutnya, pemetaan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan realisasi pertumbuhan PDRB terbesar pada masing-masing unsur dan dapat dijadikan sebagai basis ekonomi diantaranya pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur pertumbuhan nasional sebesar Rp. 77.601,1 miliar, unsur keunggulan kompetitif sebesar Rp. 12.724,4 miliar dan unsur pertumbuhan total PDRB sebesar Rp. 82.287,9 miliar. Sektor Informasi dan Komunikasi juga termasuk menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur bauran industri sebesar Rp. 46.502,4 miliar, unsur keunggulan kompetitif sebesar Rp. 15.487 miliar dan unsur pertumbuhan total PDRB sebesar Rp. 98.327,6 miliar. Selanjutnya, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi selain menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur bauran industri sebesar Rp. 25.228,8 miliar dan pertumbuhan total PDRB sebesar Rp. 68.943,4 miliar serta merupakan sektor basis berdasarkan analisis LQ dengan nilai indeks 2,63. Demikian halnya sektor Jasa Perusahaan yang menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur bauran industri sebesar Rp. 26.171,2 miliar dan sebagai sektor basis dengan nilai indeks 4,32. Selanjutnya, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi yang menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur pertumbuhan nasional sebesar Rp. 62.571 miliar dan Rp. 64.182,9 miliar, sektor Transportasi dan Pergudangan yang menghasilkan nilai PDRB tinggi pada unsur keunggulan kompetitif sebesar Rp. 8.787 miliar dan sektor Real Estate yang merupakan sektor basis dengan nilai indeks 2,17. Sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan nilai PDRB DKI Jakarta tertinggi dan sektor basis umumnya terdapat pada sektor tersier dan sebagian sektor sekunder. Akan tetapi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan sektor sekunder justru menghasilkan nilai pertumbuhan PDRB tertinggi pada analisis *Shift Share* diikuti oleh sektor Konstruksi yang juga merupakan sektor sekunder.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Sebagai implikasi penelitian ini yaitu dengan melakukan pemetaan sektor-sektor

ekonomi yang menghasilkan realisasi pertumbuhan PDRB terbesar pada masing-masing unsur dan dapat dijadikan sebagai basis ekonomi, selanjutnya dapat menjadi masukan pemerintah DKI Jakarta agar lebih cermat dalam melihat transformasi ekonomi yang terjadi di DKI Jakarta dengan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi potensial/unggulan tersebut yang memberikan kontribusi PDRB tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi yang lainnya.

Sedangkan keterbatasan penelitian ini, yaitu bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta, menganalisa sektor-sektor ekonomi yang potensial/unggul tidak hanya dengan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) saja. Akan tetapi, dapat lebih baik jika dikompilasikan dengan menganalisa sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan tingkat kesempatan kerja tinggi sehingga dapat menjadi bahan masukan yang komprehensif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menganalisa dan memberikan prioritas terhadap sektor-sektor ekonomi yang potensial/unggul untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun Terbitan. DKI Jakarta Dalam Angka. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun Terbitan. Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). PDRB Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha 2014-2018. Jakarta.
- Bank Indonesia. Berbagai Edisi Terbitan. Kajian Ekonomi Regional Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.
- Bendavid, Avrom-Lal. (1991). *Regional and local economic analysis for practitioners*. 4th Ed. New York: Praeger.
- Budiharsono, S. (2001). *Teknik analisis pembangunan wilayah pesisir dan lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Evi Yulia Purwanti. (2008). Analisis sektor dan produk unggulan kabupaten kendal semarang. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekonomi UNDIP*, 18(2).
- McCann, P. (2001). *Urban and regional economics*. New York: Oxford University Press.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia teori dan temuan empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. and Smith. S. (2004). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Wibisono, Yusuf. (2003). Determinan pertumbuhan ekonomi regional: studi empiris antar propinsi di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta (Rupiah)		
Lapangan Usaha	2011	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.277.278.000.000	1.394.390.000.000
Pertambangan, dan Pengegalian	3.029.331.000.000	2.939.850.000.000
Industri Pengolahan	156.240.345.000.000	219.744.510.000.000
Pengadaan Listrik dan Gas	3.457.901.000.000	5.228.250.000.000
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	565.084.000.000	750.740.000.000
Konstruksi	160.265.131.000.000	215.890.440.000.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	193.770.456.000.000	276.058.360.000.000
Transportasi dan Pergudangan	32.081.729.000.000	61.318.540.000.000
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.627.415.000.000	85.779.670.000.000
Informasi dan Komunikasi	90.736.420.000.000	189.064.020.000.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	114.639.141.000.000	183.582.610.000.000
Real Estate	79.359.565.000.000	111.601.210.000.000
Jasa Perusahaan	78.460.803.000.000	139.487.440.000.000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	61.800.273.000.000	67.893.780.000.000
Jasa Pendidikan	58.684.434.000.000	80.506.810.000.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.767.543.000.000	28.668.930.000.000
Jasa Lainnya	37.795.379.000.000	66.286.070.000.000
Jumlah	1.147.558.228.000.000	1.736.195.620.000.000
PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Nasional (Rupiah)		
Lapangan Usaha	2011	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	993.857.300.000.000	1.307.025.700.000.000
Pertambangan, dan Pengegalian	748.956.300.000.000	796.505.000.000.000
Industri Pengolahan	1.607.452.000.000.000	2.193.266.400.000.000
Pengadaan Listrik dan Gas	76.678.100.000.000	107.108.600.000.000
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.125.100.000.000	8.421.800.000.000
Konstruksi	683.421.900.000.000	1.048.082.800.000.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.013.199.600.000.000	1.376.937.400.000.000
Transportasi dan Pergudangan	265.774.000.000.000	435.185.300.000.000
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214.022.000.000.000	314.955.200.000.000
Informasi dan Komunikasi	281.693.800.000.000	538.874.600.000.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	256.443.000.000.000	415.579.100.000.000
Real Estate	213.441.400.000.000	300.106.700.000.000
Jasa Perusahaan	108.239.300.000.000	187.691.100.000.000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	276.336.800.000.000	349.506.600.000.000
Jasa Pendidikan	215.029.100.000.000	321.083.600.000.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.592.100.000.000	117.314.900.000.000
Jasa Lainnya	109.372.400.000.000	185.468.900.000.000
Jumlah	7.142.634.200.000.000	10.003.113.700.000.000

368

Perhitungan Analisis Shift Share						
Yt/Yo	Yit/Yio	yit/yio	G	M	S	Y
1,40	1,32	1,09	511.523.820.554	-109.048.427.341	-285.363.393.213	117.112.000.000
1,40	1,06	0,97	1.213.185.357.331	-1.020.863.387.519	-281.802.969.813	-89.481.000.000
1,40	1,36	1,41	62.571.075.520.769	-5.631.369.724.286	6.564.459.203.517	63.504.165.000.000
1,40	1,40	1,51	1.384.818.912.262	-12.515.003.056	398.045.090.794	1.770.349.000.000
1,40	1,37	1,33	226.304.631.109	-14.417.735.744	-26.230.895.365	185.656.000.000
1,40	1,53	1,35	64.182.920.327.953	21.331.498.962.792	-29.889.110.290.745	55.625.309.000.000
1,40	1,36	1,42	77.601.120.479.284	-8.037.690.558.430	12.724.474.079.147	82.287.904.000.000
1,40	1,64	1,91	12.848.078.952.308	7.601.654.340.406	8.787.077.707.286	29.236.811.000.000
1,40	1,47	1,49	23.078.605.823.814	4.098.597.471.539	975.051.704.647	28.152.255.000.000
1,40	1,91	2,08	36.338.087.888.274	46.502.447.063.990	15.487.065.047.736	98.327.600.000.000
1,40	1,62	1,60	45.910.640.744.854	25.228.855.385.241	-2.196.027.130.096	68.943.469.000.000
1,40	1,41	1,41	31.781.889.209.925	441.102.714.765	18.653.075.310	32.241.645.000.000
1,40	1,73	1,78	31.421.953.336.913	26.171.287.083.114	3.433.396.579.973	61.026.637.000.000
1,40	1,26	1,10	24.749.750.450.738	-8.385.974.017.937	-10.270.269.432.800	6.093.507.000.000
1,40	1,49	1,37	23.501.920.401.594	5.441.828.633.551	-7.121.373.035.145	21.822.376.000.000
1,40	1,62	1,61	7.115.539.042.566	3.830.752.249.191	-44.904.291.758	10.901.387.000.000
1,40	1,70	1,75	15.136.279.388.945	11.160.081.101.211	2.194.330.509.844	28.490.691.000.000

PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)					
Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.359.950	1.375.420	1.387.530	1.391.530	1.394.390
Pertambangan, dan Penggalian	2.976.970	2.956.160	2.911.790	2.916.310	2.939.850
Industri Pengolahan	177.774.890	186.802.720	193.625.440	207.942.400	219.744.510
Pengadaan Listrik dan Gas	3.826.370	3.923.970	3.904.570	4.344.530	5.228.250
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	630.510	651.810	666.200	685.690	750.740
Konstruksi	188.294.710	195.804.650	198.680.180	208.861.700	215.890.440
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	228.775.730	234.748.210	245.877.300	259.765.280	276.058.360
Transportasi dan Pergudangan	41.780.930	45.905.150	51.657.920	56.260.550	61.318.540
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.850.610	72.599.620	76.873.470	81.389.910	85.779.670
Informasi dan Komunikasi	128.510.620	141.500.800	156.515.660	172.427.810	189.064.020
Jasa Keuangan dan Asuransi	140.160.370	155.162.980	168.797.700	178.829.380	183.582.610
Real Estate	93.399.190	97.809.810	102.395.780	106.781.890	111.601.210
Jasa Perusahaan	98.965.440	106.646.600	116.289.740	128.237.350	139.487.440
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	61.594.050	62.319.340	64.388.950	61.594.190	67.893.780
Jasa Pendidikan	66.842.620	71.210.270	74.590.910	75.889.690	80.506.810
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.775.260	23.425.890	25.255.980	26.920.030	28.668.930
Jasa Lainnya	47.870.890	51.720.450	56.097.780	61.128.340	66.286.070
Jumlah	1.373.389.110	1.454.563.850	1.539.916.900	1.635.366.580	1.736.195.620

PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Nasional (Juta Rupiah)					
Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.129.052.700	1.171.445.800	1.210.955.500	1.257.875.500	1.307.025.700
Pertambangan, dan Penggalian	794.489.500	767.327.200	774.593.100	779.678.400	796.505.000
Industri Pengolahan	1.854.256.700	1.934.533.200	2.016.876.900	2.103.466.100	2.193.266.400
Pengadaan Listrik dan Gas	94.047.200	94.894.800	100.009.900	101.551.300	107.108.600
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.882.500	7.369.000	7.634.600	7.986.100	8.421.800
Konstruksi	826.615.600	879.163.900	925.040.300	987.924.900	1.048.082.800
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.177.297.500	1.207.164.500	1.255.760.800	1.311.762.500	1.376.937.400
Transportasi dan Pergudangan	326.933.000	348.855.900	374.843.400	406.679.400	435.185.300
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	257.815.500	268.922.400	282.823.400	298.079.400	314.955.200
Informasi dan Komunikasi	384.475.600	421.769.800	459.208.100	503.420.800	538.874.600
Jasa Keuangan dan Asuransi	319.825.500	347.269.000	378.279.400	398.959.300	415.579.100
Real Estate	256.440.200	266.979.600	279.500.500	289.730.400	300.106.700
Jasa Perusahaan	137.795.300	148.395.500	159.321.700	172.763.800	187.691.100
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296.329.700	310.054.600	319.965.000	326.570.700	349.506.600
Jasa Pendidikan	263.685.000	283.020.100	293.887.600	304.762.100	321.083.600
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.357.100	97.465.800	102.490.200	109.504.100	117.314.900
Jasa Lainnya	134.070.100	144.904.200	156.507.500	170.177.300	185.468.900
Jumlah	8.351.368.700	8.699.535.300	9.097.697.900	9.530.892.100	10.003.113.700

Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ)						
Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pertambangan, dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58
Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,25	0,23	0,25	0,28	0,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,56	0,53	0,52	0,50	0,51	0,52
Konstruksi	1,39	1,33	1,27	1,23	1,19	1,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,18	1,16	1,16	1,15	1,16	1,16
Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,79	0,81	0,81	0,81	0,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,61	1,61	1,59	1,57	1,60
Informasi dan Komunikasi	2,03	2,01	2,01	2,00	2,02	2,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,66	2,67	2,64	2,61	2,55	2,63
Real Estate	2,21	2,19	2,16	2,15	2,14	2,17
Jasa Perusahaan	4,37	4,30	4,31	4,33	4,28	4,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,20	1,19	1,10	1,12	1,17
Jasa Pendidikan	1,54	1,50	1,50	1,45	1,44	1,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,45	1,44	1,46	1,43	1,41	1,44
Jasa Lainnya	2,17	2,13	2,12	2,09	2,06	2,12

